

HUBUNGAN BILATERAL TIONGKOK DAN KOREA UTARA DALAM PEMBATAAN SENJATA NUKLIR TAHUN 2021-2023

Citra Kurniawan¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the role and influence of the bilateral relationship between China and North Korea in limiting North Korea's nuclear weapons development during the period 2021-2023. Although China officially opposes North Korea's nuclear program, the strong diplomatic, economic, and military ties between the two countries present challenges in denuclearization efforts. As North Korea's primary ally, China plays a significant strategic role in maintaining stability on the Korean Peninsula while avoiding conflict escalation that could threaten regional security and its economic interests.

This research employs a qualitative approach with document analysis methods to examine China's foreign policy regarding nuclear weapons and its diplomatic role in curbing North Korea's nuclear program. The findings reveal that while China actively engages in international efforts to pressure North Korea through sanctions and diplomacy, regional stability and strategic interests lead China to take a cautious approach in pushing for denuclearization.

The analysis shows that this bilateral relationship creates a strategic dilemma for China, which supports regional peace and stability while maintaining its geopolitical influence in North Korea. This study contributes to a better understanding of the dynamics of China-North Korea relations within the context of the nuclear weapons program and offers insights into global challenges in addressing the proliferation of weapons of mass destruction.

Keywords: bilateral relationship, China, North Korea, nuclear

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan pengaruh hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Utara dalam membatasi pengembangan senjata nuklir Korea Utara pada periode 2021-2023. Meskipun Tiongkok secara resmi menentang program nuklir Korea Utara, hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer yang kuat antara kedua negara menghadirkan tantangan dalam upaya denuklirisasi. Sebagai sekutu utama Pyongyang, Tiongkok memainkan peran strategis yang signifikan dalam menjaga stabilitas di Semenanjung Korea dan berusaha menghindari eskalasi konflik yang dapat mengancam keamanan regional dan kepentingan ekonominya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji kebijakan luar negeri Tiongkok terkait senjata nuklir dan peran diplomatiknya dalam membatasi program nuklir Korea Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok secara aktif terlibat dalam berbagai upaya internasional untuk menekan Korea Utara melalui sanksi dan diplomasi, stabilitas dan kepentingan strategis di kawasan membuat Tiongkok cenderung mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mendorong denuklirisasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan bilateral ini menciptakan dilema strategis bagi Tiongkok, yang di satu sisi mendukung stabilitas dan perdamaian di kawasan, namun di sisi lain mempertahankan pengaruh geopolitiknya di Korea Utara. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan Tiongkok dan Korea Utara dalam konteks program senjata nuklir, serta memberikan wawasan tentang tantangan global dalam mengatasi proliferasi senjata pemusnah massal.

Kata kunci: hubungan bilateral, Tiongkok, Korea Utara, nuklir

PENDAHULUAN

Senjata nuklir merupakan salah satu jenis senjata pemusnah massal dengan kemampuan destruktif yang jauh lebih besar dibandingkan senjata konvensional. Ledakan nuklir melepaskan energi dalam bentuk gelombang ledakan, cahaya intens, panas, dan radiasi yang dapat menyebabkan kehancuran besar-besaran, cedera, serta kematian. Sejak awal perkembangannya pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, senjata nuklir telah menjadi isu global, terutama setelah uji coba pertama yang dilakukan selama Perang Dunia II. Keberadaan senjata nuklir menciptakan *security dilemma*, sebuah situasi di mana upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru memicu ketidakamanan di negara lain, yang pada akhirnya berpotensi memperburuk stabilitas internasional.

Perkembangan senjata nuklir melahirkan kebutuhan akan regulasi internasional yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran dan penggunaannya. Salah satu tonggak penting dalam upaya ini adalah *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* yang bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata nuklir, mempromosikan perlucutan senjata, dan memfasilitasi kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai (International Institutions and Global Governance Program, 2009). Selain itu, ada perjanjian lain seperti *Biological Weapons Convention (BWC)* dan *Chemical Weapons Convention (CWC)* yang juga bertujuan untuk mengurangi ancaman dari senjata pemusnah massal (*Biological Weapons Convention – UNODA*, n.d.). Namun, efektivitas perjanjian-perjanjian ini sering diuji di kawasan-kawasan konflik, termasuk Semenanjung Korea.

Semenanjung Korea adalah salah satu wilayah paling sensitif secara geopolitik, di mana kepentingan beberapa kekuatan besar dunia bertemu. Korea Utara, salah satu dari sedikit negara yang secara aktif mengembangkan program senjata nuklir, telah menjadi pusat perhatian internasional selama beberapa decade (*Badan Pengawas Tenaga Nuklir - Talkshow Berita Satu: Ketegangan Di Semenanjung Korea, Nuklir Mengancam Asia*, n.d.). Meskipun berbagai upaya diplomasi dan sanksi internasional telah dilakukan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir di Korea Utara, negara ini tetap melanjutkan program nuklirnya, yang menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. Keberadaan senjata nuklir di Korea Utara tidak hanya mempengaruhi keamanan regional tetapi juga memicu kekhawatiran global.

Dalam konteks ini, Tiongkok, sebagai sekutu utama Korea Utara, memainkan peran strategis yang sangat penting. Meskipun secara resmi Tiongkok menentang pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara, negara ini tetap mempertahankan hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat dengan Pyongyang. Tiongkok menghadapi dilema besar; di satu sisi, ia ingin menjaga stabilitas kawasan dan menolak senjata nuklir, namun di sisi lain, ia tidak ingin melihat runtuhnya rezim Kim Jong-un yang bisa berdampak negatif pada keamanan dan ekonomi Tiongkok. Selain itu, kehadiran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Korea Selatan, seperti *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)*, menambah kompleksitas dalam kebijakan Tiongkok di kawasan tersebut (Inthaly et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan pengaruh hubungan bilateral Tiongkok dan Korea Utara dalam upaya membatasi pengembangan senjata nuklir Korea Utara selama periode 2021-2023. Dengan menganalisis hubungan geopolitik

dan peran Tiongkok sebagai mediator, penelitian ini akan memberikan gambaran mendalam mengenai upaya stabilisasi di Semenanjung Korea dalam konteks perlucutan senjata nuklir. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua negara memiliki potensi untuk menjadi alat pengaruh dalam menghentikan program nuklir Korea Utara, atau justru menjadi faktor yang memperumit upaya global menuju denuklirisasi. Melihat fenomena yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah: “Apa peran dan pengaruh hubungan bilateral Tiongkok dan Korea Utara dalam upaya membatasi pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara selama tahun 2021-2023?”

KERANGKA ANALITIK

Kerjasama Bilateral

Konsep kerjasama bilateral merupakan turunan dari konsep kerjasama internasional. Kerjasama bilateral berfokus pada kerjasama antara dua negara, berbeda dengan konsep kerjasama internasional yang pemahamannya lebih luas. Pada dasarnya Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerja sama yang terdiri dari dua pihak. Dalam hal ini terdapat dua aktor yang berperan yaitu negara. Adanya asumsi bahwa adanya rasa saling membutuhkan antara negara satu dengan negara yang lain. Hal ini dikarenakan suatu negara tidak dapat mempertahankan eksistensinya tanpa berhubungan dengan negara-negara lain.

Definisi kerja sama bilateral dari (Kusumohamidjojo, 1987) adalah suatu bentuk kerja sama di antara negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh di seberang lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi. Sebuah kerjasama bilateral yang dijalankan oleh sebuah nation-state sangat penting karena hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan kerja sama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral. Adapun kerja sama bilateral dapat mencakup berbagai bidang di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Balance of Power Theory

Konsep *balance of power* (BOP) yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz merepresentasikan sebuah "hasil" dari variabel-variabel penyebab, seperti anarki dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional (Sun, 2014). Namun, teori Waltz mendapat kritik karena terlihat seperti menjelaskan satu variabel terikat (terciptanya keseimbangan kekuatan) dengan variabel lain (polaritas sistem internasional). Untuk menanggulangi kritik ini, diperlukan evaluasi apakah kendala struktural yang menciptakan keseimbangan dalam sistem multipolar atau bipolar juga berlaku di dunia unipolar.

Balance of power sangat berkaitan dengan preferensi negara terhadap keuntungan relatif dibandingkan keuntungan absolut. Dari perspektif *realis ofensif*, John Mearsheimer berpendapat bahwa negara yang peduli dengan keseimbangan kekuatan harus memprioritaskan keuntungan relatif—khususnya keunggulan militer mereka atas negara

lain—dibandingkan keuntungan absolut, tanpa memandang seberapa besar kapasitas yang dimiliki (Sun, 2014).. Logika di balik hal ini intuitif, mengingat sistem internasional yang bersifat swadaya. Semakin besar keunggulan militer suatu negara, semakin aman negara tersebut. Namun, asumsi bahwa setiap negara akan selalu memilih untuk memiliki kekuatan militer maksimum dalam sistem tersebut tidak selalu terbukti dalam praktiknya.

Joseph Grieco juga menunjukkan bahwa dalam sistem anarki yang memungkinkan terjadinya perang, negara tidak bisa sepenuhnya bekerja sama, bahkan dengan sekutunya, karena kelangsungan hidup hanya bisa dijamin dengan *proportionate advantage* (keuntungan proporsional) (Grieco, 1988). Keprihatinan atas keuntungan relatif memperkirakan bahwa negara akan lebih memilih keseimbangan kekuatan daripada keamanan kolektif, karena keamanan kolektif mengharuskan negara untuk sepenuhnya mengabaikan keuntungan relatif melalui pelucutan senjata secara sepihak. Hal ini secara inheren bertentangan dengan gagasan bahwa setiap negara harus memiliki keuntungan posisional untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Ali dan Yusof mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik, dan lebih menekankan pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini membedakan metode kualitatif dari metode kuantitatif yang mengandalkan analisis statistik dan perhitungan komputasi. Dalam penelitian kualitatif, fokus utama adalah untuk memahami makna dan konteks dari fenomena yang diamati, dengan memperhatikan kekuatan kata-kata dan frasa yang digunakan dalam proses analisis.

Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh—baik berupa kata-kata, gambar, maupun perilaku—dalam bentuk deskripsi naratif, bukan angka atau statistik. Penelitian kualitatif berupaya memahami dan menggambarkan fenomena secara kritis, dengan identifikasi peristiwa yang nyata . Sukmadinata menegaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif mengutamakan pemahaman terhadap karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan tanpa memberikan manipulasi atau perlakuan pada variabel yang diteliti . Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali lebih dalam hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara.

PEMBAHASAN

Sejarah hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Utara bermula sejak Perang Korea (1950-1953), di mana Tiongkok mendukung Korea Utara melawan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Setelah perang, hubungan kedua negara dibangun atas dasar ideologi komunis dan perjanjian aliansi militer, yang memperkuat hubungan strategis mereka. Tiongkok terus menjadi mitra ekonomi terbesar Korea Utara, memberikan bantuan ekonomi, perdagangan, dan diplomatik yang signifikan. Namun, hubungan ini sering tegang akibat ambisi nuklir Korea Utara, yang secara konsisten ditentang oleh Tiongkok.

Meskipun demikian, Tiongkok tetap mendukung berbagai sanksi internasional terhadap Korea Utara, yang diberlakukan oleh PBB atas uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik yang terus berlangsung. Namun, Tiongkok juga kerap menyerukan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan ketegangan terkait nuklir di Semenanjung Korea, dengan tujuan menjaga stabilitas regional.

Selain itu, Tiongkok telah menjadi perantara diplomasi dalam upaya menenangkan ketegangan antara Korea Utara dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Meski mendukung sanksi, Tiongkok tetap mempertahankan hubungan ekonomi dengan Korea Utara, meskipun dengan kontrol ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Kawasan Semenanjung Korea, yang dikelilingi oleh kekuatan militer besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat, menjadi titik penting dalam geopolitik global, terutama terkait isu nuklir.

Di era modern, meskipun ambisi nuklir Korea Utara menjadi sumber ketidakpuasan bagi Tiongkok, negara ini terus menjadi pendukung utama bagi rezim Korea Utara. Tiongkok, sejak awal, menolak program nuklir Korea Utara, dan berperan aktif dalam upaya diplomasi untuk mendorong denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, ambisi Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir telah muncul sejak 1950-an, dan terus menjadi fokus perhatian internasional ketika kapasitas nuklir Korea Utara semakin berkembang.

Seiring meningkatnya ketegangan internasional, Tiongkok memperluas perannya dengan berpartisipasi dalam negosiasi dan mengusulkan perundingan multilateral. Tanggung jawab strategis Tiongkok dalam krisis rudal Semenanjung Korea semakin disoroti, terutama oleh Jepang dan Amerika Serikat, yang menekan Tiongkok untuk berbuat lebih banyak dalam menegakkan sanksi terhadap Korea Utara.

Pengerahan sistem pertahanan rudal THAAD oleh Amerika Serikat di Korea Selatan menambah ketegangan, karena dianggap oleh Tiongkok sebagai ancaman terhadap kedaulatannya. Ini sejalan dengan teori "balance of power" yang menjelaskan bahwa negara-negara berusaha menyeimbangkan ancaman dengan strategi militer atau kerja sama dengan negara lain. Tiongkok, dalam hal ini, tetap konsisten dalam tujuan denuklirisasi Korea Utara melalui penerapan sanksi ekonomi, meskipun pendekatan ini disertai perubahan kebijakan akibat tekanan eksternal.

Tiga faktor utama yang memicu perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terkait nuklir Korea Utara adalah tekanan internasional untuk mengekang Korea Utara, uji coba rudal Korea Utara yang semakin mengkhawatirkan, dan tekanan dari Amerika Serikat. Sebagai respons terhadap faktor-faktor ini, Tiongkok mengambil langkah tegas untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan.

Peran Tiongkok sebagai mediator dalam denuklirisasi di Semenanjung Korea sangat penting mengingat posisinya sebagai sekutu utama Korea Utara, kekuatan dominan di kawasan, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sejak program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1950-an, Tiongkok memainkan peran sentral dalam mendukung dialog antara pihak-pihak terkait, baik melalui forum multilateral seperti Six Party Talks maupun perundingan bilateral.

Sebagai mediator, Tiongkok menggunakan pendekatan diplomasi damai untuk meredakan ketegangan antara Korea Utara dan negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Melalui diplomasi ini, Tiongkok mendorong Korea Utara untuk melanjutkan dialog dan menghentikan uji coba nuklir. Selain itu, Tiongkok

berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan Pyongyang dan komunitas internasional, yang memperkuat stabilitas regional.

Meskipun Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap Korea Utara, ada batasan dalam seberapa jauh Pyongyang mematuhi tekanan Tiongkok. Korea Utara sering kali mempertahankan kedaulatannya dan tetap melanjutkan program nuklirnya, bahkan dalam menghadapi sanksi ekonomi yang dipimpin oleh Tiongkok di bawah resolusi PBB. Namun, Tiongkok tetap memandang stabilitas di Semenanjung Korea sebagai prioritas utama, dan oleh karena itu menghindari tindakan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan atau keruntuhan rezim Korea Utara.

Sebagai mediator, Tiongkok menekankan pentingnya dialog yang damai dan solusi diplomatik atas penggunaan kekuatan militer. Dengan demikian, Tiongkok sering bertindak sebagai penyeimbang antara kebutuhan Korea Utara untuk mempertahankan kedaulatannya dan tuntutan internasional untuk denuklirisasi, berusaha mencapai solusi yang stabil dan dapat diterima semua pihak.

Selain menjadi mediator utama, Tiongkok memiliki kepentingan strategis di Semenanjung Korea yang mempengaruhi pendekatan diplomatiknya. Tiongkok berusaha menghindari potensi konflik yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan di perbatasannya dan memicu arus pengungsi besar-besaran dari Korea Utara. Stabilitas regional sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok selalu menekankan pentingnya solusi damai yang tidak hanya menghindari konflik tetapi juga mencegah kolapsnya rezim di Pyongyang. Tindakan ekstrem seperti invasi atau perubahan rezim yang didukung oleh kekuatan luar dianggap tidak menguntungkan bagi Tiongkok, karena hal itu dapat mengancam posisinya di kawasan.

Meskipun demikian, Tiongkok sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, Tiongkok harus menegakkan sanksi internasional yang dipimpin oleh PBB terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan rudal balistik. Di sisi lain, Tiongkok juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara sebagai sekutu ideologis dan buffer zone strategis terhadap pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Tiongkok menghindari sanksi yang terlalu keras, khawatir tindakan semacam itu akan merusak ekonomi Korea Utara secara berlebihan dan mengakibatkan ketidakstabilan yang tidak diinginkan.

Peran Tiongkok dalam Six Party Talks, yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok sendiri, merupakan contoh konkret dari upaya diplomatik Tiongkok dalam mendorong denuklirisasi. Dalam forum ini, Tiongkok sering berperan sebagai fasilitator, mendorong Pyongyang untuk terlibat dalam dialog sambil menjaga keseimbangan dengan kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Meskipun perundingan ini belum menghasilkan denuklirisasi penuh, Six Party Talks menunjukkan bagaimana Tiongkok mampu menjaga komunikasi terbuka di antara semua pihak yang terlibat, bahkan ketika ketegangan memuncak.

Keberhasilan Tiongkok sebagai mediator juga bergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Meski sering kali berselisih pendapat dengan Washington mengenai strategi penanganan Korea Utara, Tiongkok tetap mendukung upaya internasional untuk membatasi proliferasi nuklir. Pengaruh Tiongkok pada Korea Utara menjadikannya salah satu pemain kunci dalam setiap upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan perannya sebagai mediator memungkinkan adanya keseimbangan yang lebih moderat dalam negosiasi yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kepentingan yang saling bertentangan.

KESIMPULAN

Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Utara didasarkan pada aliansi strategis yang lama serta dukungan ekonomi. Meskipun begitu, Tiongkok memprioritaskan stabilitas regional dan menentang program nuklir Korea Utara. Tiongkok telah berperan penting dalam upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan mendukung sanksi internasional dan beralih dari pendekatan diplomasi ke penerapan sanksi ekonomi yang lebih ketat untuk mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara.

Tiongkok menghadapi tekanan internasional yang semakin besar untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengakhiri krisis rudal Korea Utara, dengan fokus pada denuklirisasi. Meskipun Tiongkok berusaha menjaga stabilitas regional dan menyeimbangkan tekanan terhadap Korea Utara, mereka harus berhati-hati agar tidak mengganggu stabilitas internal negara tersebut, yang dapat berdampak negatif bagi kawasan.

Program nuklir Korea Utara dimulai pada 1950-an dengan dukungan awal dari Uni Soviet dan berkembang pesat sepanjang dekade berikutnya seiring dengan peningkatan belanja militer serta kemandirian pengembangan rudal. Upaya denuklirisasi dimulai pada tahun 1992, namun mengalami kemunduran dengan kegagalan perjanjian tahun 1994 dan berlanjut dengan pembicaraan enam pihak untuk menyelesaikan isu nuklir. Sementara itu, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Korea Utara terpengaruh oleh sanksi internasional dan pandemi COVID-19, tetapi kembali pulih pada 2022. Tiongkok terus memberikan bantuan langsung kepada Korea Utara, termasuk dalam bentuk pangan dan energi, sementara situasi kemanusiaan di Korea Utara tetap kritis dengan kelaparan dan kekurangan gizi yang meluas.

Sebagai mediator utama dalam negosiasi internasional terkait program nuklir Korea Utara, pengaruh Tiongkok terhadap kebijakan nuklir Korea Utara tetap terbatas. Tiongkok berusaha mempertahankan Korea Utara sebagai zona penyangga terhadap kehadiran militer AS di Korea Selatan. Meskipun Tiongkok tidak mendukung program nuklir Korea Utara, bantuan militer dan teknologi yang pernah diberikan mungkin berkontribusi pada kemampuan militer negara tersebut. Tiongkok menghadapi tantangan besar dalam menekan Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya, karena Korea Utara sering bertindak secara independen dan melihat pengembangan senjata nuklir sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Tenaga Nuklir - Talkshow Berita Satu: Ketegangan di Semenanjung Korea, Nuklir Mengancam Asia.* (n.d).
<https://www.bapeten.go.id/berita/talkshow-berita-satu--ketegangan-di-semenanjung-korea-nuklir-mengancam-asia-134720?lang=en>
- Biological Weapons Convention – UNODA.* (n.d).
<https://disarmament.unoda.org/biological-weapons/>
- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal institutionalism. *International Organization*, 42(3), 485–507.
<https://doi.org/10.1017/s0020818300027715>

<p>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 88-95 e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2861</p>	<p>Article History: <i>Submitted: Sept 10, 2024</i> <i>Accepted: Oct 24, 2024</i> <i>Published: Oct 27, 2024</i></p>
---	---

- International Institutions and Global Governance Program. (2009, March 30). The global nuclear nonproliferation regime. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/report/global-nuclear-nonproliferation-regime>
- Inthaly, A., Risdhianto, A., & Sarjito, A. (2022). The reason South Korea approved the placement of a High-Altitude Area Defense (THAAD) terminal system in 2016. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.24036/jess.v6i1.397>
- Kusumohamidjojo, B. (1987). *Hubungan internasional kerangka studi analitis*.
- Sun, M. (2014, February 12). *Balance of power theory in today's international system*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2014/02/12/balance-of-power-theory-in-todays-international-system/>